



welcome Home KCM

Ekonomi

Metro

Kesehatan

Teknologi

Internasional

Gaya H

**KOMPAS**  
 AMANAT HATI NURANI  
 RAKYAT
**Naper**

## ▼ Rubrik

[Berita Utama](#)[Buku](#)[Desain](#)[Foto dan Komik](#)[Hiburan](#)[International](#)[Kehidupan](#)[Keluarga](#)[Konsultasi](#)[Kontak](#)[Metropolitan](#)[Naper](#)[Nasional](#)[Nusantara](#)[Olahraga](#)[Perjalanan](#)[Seni & Budaya](#)[Surat Pembaca](#)[Urban](#)

## ► Berita Yang Ialu

[Anak](#)[Audio Visual](#)[Bahari](#)[Bentara](#)[Bingkai](#)[Dana Kemanusiaan](#)[Didaktika](#)[Ekonomi Internasional](#)[Ekonomi Rakyat](#)[Fokus](#)[Furnitur](#)[Ilmu Pengetahuan](#)[Interior](#)[Jendela](#)[Kesehatan](#)[Lingkungan](#)[Lintas Timur Barat](#)[Makanan dan Minuman](#)[Muda](#)[Musik](#)[Otomotif](#)[Otonomi](#)[Pendidikan](#)[Pendidikan Dalam Negeri](#)[Pendidikan Informal](#)[Pendidikan Luar Negeri](#)

Minggu, 05 Maret 2006

**ASAL USUL****Diskriminasi**

Ariel Heryanto

Berapa Anda membayar harga koran yang Anda baca ini? Sama dengan yang dibayar orang-orang lain? Bayangkan seandainya harga itu berbeda-beda, menurut perbedaan warna kulit pembeli, warna rambut, atau jenis kelamin. Aneh? Mungkin kedengaran agak gila. Apa boleh buat, di hari segini yang namanya pasar kapitalisme masih saja pilih-pilih identitas pelaku transaksi jual beli.

Di kebanyakan pasar, sayur atau telur dijual lewat tawar-menawar. Juga ongkos naik becak atau andong. Kesepakatan harga tidak semata-mata ditentukan oleh kelihian orang membujuk pihak lain. Warna kulit, penampilan busana, cara bersolek, dan logat bahasa calon pembeli sering kali ikut menentukan.

Di Jawa dan beberapa pulau lain, orang yang berpenampilan oriental dianggap "tidak pribumi". Tidak peduli apa pun persisnya etnisitas mereka menurut penggolongan pemerintah. Yang jelas, penampilan oriental cenderung mengundang tarif lebih tinggi dalam transaksi pasar. Mereka dianggap keturunan Tionghoa atau yang "sebangsa" (Jepang, Korea, atau Vietnam). Semuanya dianggap kaya raya. Sekali lagi, tidak penting sejauh mana praduga itu benar. Tapi biasanya praduga sosial juga tidak sepenuhnya keliru.

Masalahnya, ini tidak murni sentimen rasialis. Sedikit banyak, ini sebentuk tindak mencari keadilan. Ini perang dingin antarkelas, bukan etnisitas. Gerilya kecil-kecilan kaum miskin terhadap kaum kaya yang diuntungkan sistem kapitalisme global dan diperparah oleh kebijakan negara, khususnya di zaman Orde Baru.

Masalahnya, kalau benar itu yang terjadi, semestinya semua kaum kaya dari golongan etnik atau agama apa pun dikenai harga lebih tinggi dari yang biasa. Tapi perang kelas itu, seperti perang apa pun, tidak selalu rapi dan rasional. Medan perang sering dirancukan oleh kepentingan, bias, dan ketegangan lain yang berkait dengan warna kulit, keyakinan agama, atau kebangsaan.

Jangan berprasangka itu hanya berlaku di Indonesia. Mungkin ini universal. Seorang sahabat karib saya di Melbourne pernah bercerita. Sebagai Muslimah dia memilih berjilbab bila berbelanja ke pasar Victoria di pusat kota Melbourne. Dengan memulai sapaan "assalamualaikum..." kepada beberapa pedagang seiman, harga-harga mendadak rontok khusus untuk dia.

Begitulah ruang pasar "swasta". Berlaku hukum permintaan lawan penawaran yang tidak pernah bebas dari aneka diskriminasi, entah seksual, rasial, agama, kelas, atau kebangsaan. Persoalannya jadi sedikit lain dan lebih serius ketika praktik seperti itu dilakukan pejabat negara dalam pelayanan publik di kantor

## Diunduh dari <arielheryanto.wordpress.com>

pemerintahan.

- Perbankan
- Pergelaran
- Perhubungan
- Pixel
- Properti
- Pustakaloka
- Rumah
- Sorotan
- Swara
- Tanah Air
- Teknologi Informasi
- Telekomunikasi
- Teropong
- Wisata
- Info Otonomi
- Tentang Kompas
- Kontak Redaksi

Di kantor pos, misalnya, ada tarif pos dan prangko yang baku untuk semua warga, juga orang asing. Tapi dalam pengiriman paket antarnegara di beberapa kota ada petugas Bea dan Cukai yang punya tabiat menodongkan tangan terbuka dan minta "bea administrasi" tambahan tanpa kuitansi tanda terima. Cerita yang sama terdengar di seputar kantor imigrasi, pengadilan, atau kantor polisi, bahkan universitas.

Tindakan itu jelas tidak dibenarkan hukum. Tidak juga secara moral. Berbeda dari pedagang kecil yang harus mengandalkan modal sendiri dan mengambil risiko merugi dalam usahanya. Si pegawai negeri menerima gaji tetap setiap bulan. Tidak peduli negara sedang kaya raya atau menderita kebangkrutan.

Pungutan liar itu tidak masuk kas negara. Tidak juga ke kantong pejabat rendahan yang bekerja keras menjaga loket dan melayani publik. Uang siluman itu masuk kantong atasannya yang kerjanya ongkang-ongkang di belakang meja, merokok sambil menonton acara infotainment di televisi. Bahkan untuk membeli rokok yang diisapnya ia menyuruh pegawai yang sedikit lebih rendah pangkatnya.

Yang terlebih parah lagi, bila besarnya pungutan liar di kantor negara itu berbeda-beda, menurut warna kulit orang. Yang terjadi sama sekali bukan perang gerilya dari kaum miskin terhadap kaum kaya. Tidak ada moralitas keadilan. Justru sebaliknya! Sebentar lagi tindakan seperti itu bisa dianggap sebagai kriminal, bila RUU antidiskriminasi disahkan negara.

Masih ada satu praktik lain yang layak menjadi sasaran tembak UU antidiskriminasi. Di beberapa tempat wisata, ada harga tiket resmi yang berbeda bagi turis WNI dan turis asing. Bedanya bisa beberapa puluh kali lipat. Bahkan acara seminar di kalangan intelektual Indonesia sering memberlakukan diskriminasi serupa. Bukankah ini merupakan sebuah pernyataan terbuka berisi sebuah keyakinan yang salah kaprah: semua warga bangsa sendiri kere, semua orang asing di dunia kaya raya?

Di berbagai tempat wisata, petugas tidak mau repot-repot bertanya apalagi memeriksa bukti kewarganegaraan pengunjung. Yang dilihat hanya warna kulit dan bentuk hidung. Semua yang bertampang Melayu dianggap WNI dan boleh membayar tiket kelas kambing, yang berkulit putih WNA, tarifnya melambung ke langit.